

## FILANTROPI DAN PEMBANGUNAN

**Imron Hadi Tamim**

Universitas Udayana, Badung, Bali Indonesia

el\_tamam@yahoo.co.id

### **A. Pendahuluan**

Festival filantropi yang diselenggarakan pada tanggal 6-9 oktober 2016 oleh PFI (Perhimpunan Filantropi Indonesia) merupakan salah satu kegiatan yang mengisyaratkan bahwa filantropi itu potensial dan eksistensinya itu ada bukan ilusi. PFI adalah kumpulan dari para pegiat-pegiat filantropi dengan basis individu maupun lembaga yang berupaya untuk mentransformasikan potensi-potensi filantropi di Indonesia sebagai sektor ketiga dalam pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Gagasan atau ide tentang filantropi sebagai pilar ketiga pembangunan merupakan gagasan dari The Organization of Economic Co-operation for Development yang menginisiasi pentingnya peran serta perusahaan dalam mendukung program pembangunan yang berkelanjutan sebagai akibat dari isu perubahan iklim dan pemanasan global. Dari pertemuan internasional inilah lahir beberapa gagasan tentang corporate social responsibility (CSR) dan tentang *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan).

Tradisi filantropi sudah ada eksistensinya jauh sebelum kongres OECD diselenggarakan. Berderma dalam berbagai konteksnya merupakan tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat kita. Aktifitas memberi dan berbagi terhadap sesama yang “membutuhkan” bukanlah hal yang susah untuk dijumpai di tengah-tengah kehidupan masyarakat baik di desa maupun di kota. Berderma bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja tanpa ada batasan dari kelompok tingkatan ekonomi mana, berstatus sosial apa dan dari golongan stratifikasi sosial yang bagaimana. Filantropi

juga bukan merupakan aksi individu, akan tetapi lebih kompleks lagi bisa aksi kelompok bahkan juga aksi yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian tidak ada anggapan bahwa berderma hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja yaitu orang kaya, dan orang yang belum mencapai pada derajat atau tingkatan “kaya” tidak layak disebut sebagai dermawan (orang yang suka berderma).

Berderma dalam terminologi kontemporer lebih dikenal dengan istilah filantropi. Selain terminologi filantropi, ada juga yang memakai istilah karitas (charity) juga sering dipakai untuk kegiatan penggalangan dana sosial. Filantropi ataupun karitas menjadi penting bagi ahli developmentalis kontemporer. The Organization of Economic Cooperation for Development (OECD) memberikan kontribusi yang besar terhadap konsep filantropi yang tidak terbatas pada individu atau kelompok, akan tetapi lebih luas lagi filantropi juga dilakukan oleh korporasi (private sector). Namun di dalam tulisan ini, penulis tidak akan mengulas secara jauh perdebatan mengenai apakah korporasi atau perusahaan juga merupakan pelaku filantropi (philanthropist). Yang menarik dari OECD adalah gagasan tentang filantropi sebagai pilar ketiga pembangunan masyarakat. Tulisan singkat ini akan membahas dan mengupas tentang potensi filantropi sebagai pilar ketiga pembangunan masyarakat, tantangan serta prospek ke depan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Filantropi dan Jenis Filantropi**

Kata Filantropi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani dari kata *philein* yang artinya cinta dan *anthropos* artinya manusia. Filantropi secara terminologi artinya tindakan seseorang yang ditujukan kepada orang lain yang dilandasi perasaan cinta kepada sesama manusia serta nilai kemanusiaan.dengan maksud untuk menolongnya, baik dalam bentuk material maupun immaterial. Robert L. Payton memberikan definisi filantropi sebagai aktifitas sukarela untuk kemaslahatan publik (Payton & Moody, 2008).Menurut Prihatna (2005:3), istilah filantropi (philanthropy) berasal dari bahasa Yunani, *Philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia). Secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktik memberi (giving), pelayanan servis (services) dan asosiasi secara

sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Sebagai bentuk rasa cinta, individu atau kelompok, filantropi diwujudkan dengan menyisihkan sebagian dari waktu, bantuan (pertolongan) atau uang untuk kebaikan masyarakat (Encarta, 2004). Di dalam American heritage Dictionary, pengertian filantropi mencakup tiga hal; 1) upaya untuk meningkatkan taraf hidup umat manusia, 2) mencintai umat manusia secara universal dan 3) aktivitas yang diarahkan untuk mempromosikan kesejahteraan manusia (<http://www.dictionary.com>). Dalam kamus besar bahasa Indonesia filantropi diartikan dengan tindakandermawana (kedermawanan). Diartikan derma, karena orang yang senantiasa terbuka dan senang memberikan sesuatu kepada orang lain yang dicintainya disebut sebagai dermawan. Seseorang tidak akan memberikan sesuatu dengan terpaksa kepada orang kecuali terhadap orang yang dicintainya. Meskipun kita juga seringkali menyaksikan orang yang memberikan hartanya atau menolong orang lain dengan motivasi lainnya seperti terpaksa atau ingin dipuji atau ingin pamer dan kepentingan lainnya (Neilsen, 1996). Perbuatan yang demikian tidak termasuk dalam kategori filantropi karena ada rasa keterpaksaan. Yang saya maksudkan dengan filantropi disini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun. Dengan demikian, filantropi secara umum dapat diartikan sebagai tindakan sukarela yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kemaslahatan (kepentingan) publik terutama kaum miskin.

Filantropi merupakan salah satu modal sosial yang hampir dimiliki oleh semua kalangan masyarakat manapun. Filantropi sebagai sebuah tradisi telah menyatu di dalam kultur komunal yang telah mengakar sejak lama khususnya di masyarakat pedesaan. Fakta kultural menunjukkan bahwa tradisi filantropi dilestarikan melalui pemberian derma kepada teman, keluarga, dan tetangga yang kurang beruntung. Ciri lainnya ditunjukkan dengan tuntutan masyarakat untuk memprioritaskan tujuan meringankan beban orang miskin yang jumlahnya naik hingga 48% selama krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 (Pirac, 2002:9).

Dari tradisi keenam agama besar yang diakui legalitasnya di Indonesia, *risalah* filantropi dapat kita temukan di dalam kitab-kitab suci agama tersebut. Di dalam ajaran Islam, kegiatan filantropi melekat

dalam konsep dan praktik zakat, infak, sedekah dan waqaf. Filantropi dalam ajaran agama Hindu dikenal dalam konsep *datria datriun* (zakat dalam bahasa Islam) dan *danapatra* (penerima) (Thaha, 2003: 91; Pirac, 2002:8). Konsep yang serupa dalam agama Budha dikategorikan sebagai etika atau *sutta nipata*. Ajaran ini mendasarkan diri pada lima prinsip dasar; memberi dalam iman, memberi dengan seksama, memberi dengan segera, memberi dengan sepenuh hati dan memberi untuk tidak mencelakakan diri sendiri dengan orang lain (Thaha, 2003:92). Dalam ajaran agama Kristen, konsep *tithe* (sepersepuluh) dipahami sebagai bagian dari pendapatan seseorang yang ditentukan oleh hukum untuk dibayar kepada gereja bagi pemeliharaan kelembagaan, dukungan untuk pendeta, promosi kegiatannya dan membantu orang miskin (Thaha, 2003:93). Sedangkan dalam tradisi agama Konghucu, filantropi dapat ditelusuri pada konsep kemanusiaan 'konfusius' dan cinta partikular 'mencius' (Ilchman et.al, 2006:196). Di dalam kedua konsep tersebut terkandung sifat yang inheren didalamnya seperti sifat keadilan, kedermawanan, keikhlasan, kesungguhan dan kebaikan.

Menurut Warren (2006), Filantropi yang berkembang di tengah masyarakat dapat dipahami dalam dua konteks; filantropi agama dan filantropi sosial. Filantropi agama dipahami sebagai bagian yang terintegrasi ke dalam ajaran agama (Abubakar dan Chaider SB, 2006:6). Hal ini berdasarkan bahwa semua agama mengemban misi suci yang sama yaitu mengajak manusia untuk senantiasa berbuat kebajikan. Manusia yang berafiliasi sebagai pemeluk dan penganut suatu agama tertentu mentransformasikan ajaran yang dirisalahkan oleh agamanya, diinternalisasikan ke dalam diri untuk dipraktikkan dalam bentuk perilaku atau tindakan. Tingkat pemahaman dan penghayatan mendalam dan objektif terhadap ajaran-ajaran agama tentunya akan melahirkan tindakan yang positif. Praktik filantropi agama dalam kultur masyarakat tradisional bersifat sembunyi-sembunyi

Ditinjau dari sisi tata kelola, filantropi dibagi menjadi dua bentuk; pertama *citizen filantropi* (filantropi warga) dan *organized filantropi* (filantropi terorganisir). Citizen Filantropi merupakan aktifitas memberi yang umumnya dilakukan oleh individu perorangan atau sekelompok orang atau warga masyarakat. Citizen filantropi bisa dikategorikan ke

dalam filantropi karitas atau kegiatan amal. Filantropi jenis ini mempunyai sifat azas manfaat jangka pendek. Organized filantropi adalah bentuk filantropi yang terorganisir dan terlembagakan (Schearer, 1995). Filantropi ini berbentuk sebuah lembaga yang mempunyai struktur organisasi, visi dan program kerja yang mengatur kinerja bagaimana dana filantropi didistribusikan kepada para penerima. Demikian juga dengan filantropis atau pelaku filantropi bukan hanya dari golongan perorangan, namun juga dari kelompok dunia usaha (pebisnis) (Peter, 2006).

## **2. Perkembangan Kajian Tentang Filantropi**

Robert L. Payton (1926-2011) merupakan tokoh yang mempopulerkan dan menghabiskan waktunya untuk melakukan studi tentang filantropi. Proyeksi studi filantropi dimulai sejak tahun 1988 dengan mendirikan pusat studi filantropi di Universitas Indiana. Dia memimpin di pusat studi filantropi yang didirikannya itu dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1993. Beberapa peneliti tergabung dalam proyek studinya adalah Dwight F. Burlingame, Albert B. Anderson, Karen J Blair, Dennis Young, Gregory Eiselein, Marcos Cueto, Jerome L. Himmelstein, Thomas H Jeavon, Mike W Martin, Mary J Oates, J.B. Schneewind, David H Smith, Warren F Ilchman, Stanley Katz dan Queen II.

Robert L Payton juga merupakan tokoh yang berkontribusi besar dalam merumuskan kembali makna dan eksistensi serta signifikansi filantropi dalam rangka memperbaiki kehidupan dan kemaslahatan publik. Dari point kemaslahatan public inilah lahir lembaga-lembaga filantropi yang kreatif dan inovatif untuk memberikan berbagai bentuk dan jenis pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai kemaslahatan bersama (Payton & Moody, 2008). Disamping Payton, Anheier juga memberikan kontribusi dalam mengurai berbagai pendekatan yang digunakan oleh berbagai lembaga filantropi dari masa klasik hingga kontemporer dan masa yang akan datang.

Anheier membagi periodisasi kajian filantropi ke dalam empat pendekatan; pendekatan karitas, pendekatan saintifik filantropi, pendekatan saintifik baru dan pendekatan filantropi kreatif. Pendekatan karitas merupakan bentuk asli (original) dari filantropi yang berkembang di seluruh dunia dengan sebutan dan penamaan yang berbeda-beda.

Pendekatan karitas ini berakar dari keyakinan agama seperti ajaran sepersepuluh di dalam ajaran agama Kristiani, zakat infaq sadaqah (ZIS) dalam ajaran Islam, dana punia (Hindu). Tidak ada ketentuan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang bagaimana lembaga filantropi mendistribusikan dana karitas. Di berbagai negara, pendekatan karitas ini merupakan hal yang paling dominan, meskipun pada tataran praktis mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan secara kelembagaan terlihat bahwa lembaga filantropi belum mampu mengeksplorasi potensi hebat dalam dirinya. Sumber dana dari lembaga filantropi bersumber dari basis keyakinan agama. Ditinjau dari segi dampaknya terhadap penerima, karitas mempunyai aspek manfaat terbatas dan temporer (*short-term*). Pendekatan karitas mulai mengalami anomali bahkan kurang populer memasuki era abad ke 20 (Anheier & Leat, 2006).

Pada era abad ke 20, pendekatan saintifik filantropi mulai diadopsi oleh banyak lembaga filantropi. Pendekatan saintifik filantropi merupakan pendekatan ilmiah saintifik dengan menggunakan teknik rekayasa sosial untuk mengurai akar masalah-masalah sosial seperti halnya kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pendekatan ini berasumsi bahwa masalah sosial, kesehatan dan ekonomi akan mampu diselesaikan jika akar penyebab masalah sudah dipahami dan bisa diidentifikasi. Filantropi dengan pendekatan ini memfokuskan program kerjanya di bidang pendidikan (pelatihan) dan penelitian daripada memberikan pelayanan sosial. Anomali bagi lembaga filantropi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan sosial bagi kaum marginal mulai mengalami ketidak efektifan kinerja dan inefisiensi. Persoalan waktu yang lama dan *cost* pembiayaan yang tinggi menambah intensitas problematikadi tubuh lembaga filantropi dalam mengembangkan potensinya.

Setelah era saintifik (ilmiah), lembaga filantropi mencoba untuk menerapkan metode baru yang disebut dengan pendekatan saintifik baru. Kebaruan pendekatan ini terletak pada dampak cakupan dan keberlanjutan dampakdibandingkan dengan pendekatan saintifik. Namun pendekatan ini pada akhirnya juga mengalami stagnasi dan mulai beralih pada pendekatan apa yang disebut oleh Anheier sebagai filantropi kreatif. Filantropi kreatif yaitu filantropi yang menekankan pada kebebasan pengembangan kreatifitas kelembagaan filantropi dalam membuat terobosan-terobosan

dalam memberikan pelayanan. Filantropi kreatif akan tercipta dengan beberapa prasyarat; pertama lembaga filantropi independen, bebas dan netral. Kedua, lembaga filantropi dibentuk dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama bukan untuk kemaslahatan segelintir orang, atau sekelompok golongan.

### 3. Filantropi sebagai Modal Sosial dalam Pembangunan

Gagasan tentang keterkaitan antara filantropi dan pembangunan adalah tidak terlepas dari kontribusi yang berawal dari ide Robert Putnam dan James O Midgley yang mengkaji tentang modal sosial (social capital) dalam pembangunan. Baik Robert Putnam maupun Midgley meletakkan faktor modal sosial sebagai pilar penyanggah dalam konteks pembangunan. Midgley (1995), memetakan peranan tiga aktor penting dalam membangun kesejahteraan sosial yang harus saling bersinergi yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Peran pemerintah di dalam pengentasan kemiskinan dilihat dari sudut pandang state apparatus yang dihubungkan dengan fungsi pemerintah sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas untuk mensejahterakan rakyatnya berupa kebijakan-kebijakan sosial. Sedangkan peranan pihak swasta merujuk pada pandangan dari Adam Smith tentang *invisible hand*. Banyaknya lapangan pekerjaan yang dibuka oleh sektor swasta akan berdampak pada pengurangan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Disamping itu, program *corporate social responsibility* yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang diimplementasikan dalam aktivitas sosial-kemanusiaan dan kerja-kerja sosial. Dan ketiga yaitu masyarakat, masyarakat dilihat sebagai komponen mandiri yang mempunyai modal sosial untuk mengentaskan dirinya dan anggotanya dari jaring kemiskinan. Modal Sosial yang dimiliki masyarakat diantaranya adalah filantropi (aksi kedermawanan).

Disamping memetakan peranan dari ketiga aktor pilar pembangunan, Midgley (1997) juga memberikan tawaran teknis bagaimana filantropi sosial menjadi salah satu pendekatan di dalam mempromosikan kesejahteraan sosial melalui pemberian layanan service kemanusiaan, berupa penyediaan layanan di bidang kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kegiatan ekonomi produktif. Gagasan yang dicetuskan oleh Midgley senada dengan

gagasan yang ditawarkan oleh Anhier sebagai filantropi kreatif. Penawaran Midgley melalui pemetaan ini bukan hanya bertujuan untuk memperjelas posisi keberadaan aktor siapa berperan sebagai apa dalam pembangunan masyarakat, akan tetapi bagaimana filantropi mempunyai kemampuan kreatif untuk mengembangkan kapasitasnya sebagai pilar pembangunan.

#### **4. Bagaimana Pemanfaatan Filantropi di Indonesia sebagai Pilar Ketiga Pembangunan?**

Gagasan yang mengintegrasikan filantropi sebagai sektor ketiga dalam pembangunan masyarakat sebenarnya bukan ide baru yang kemunculannya baru-baru ini. Studi awal yang dilakukan oleh PIRAC (PublicInterest Research And Advocacy Centre) (2002:7) menunjukkan potret bagaimana berlangsungnya praktik filantropi di Indonesia. Periode ini merupakan periode pertama dan awal lembaga PIRAC sebagai institusi dan lembaga yang memperkenalkan wacana tentang filantropi di Indonesia. Pengenalan tentang wacana filantropi diawali dengan publikasi buku dari hasil penelitiannya tentang potensi dan motivasi filantropi. Setelah lembaga PIRAC, pusat bahasa Penelitian mengenai filantropi juga dilakukan oleh lembaga CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2006) dengan judul “ Filantropi Islam dan Keadilan Sosial ; Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia”. di dalam penelitiannya memfokuskan pada tradisi filantropi Islam. Filantropi Islam sebagaimana yang dilakukan oleh CSRC ini mengungkap cara umat islam berfilantropi yaitu dengan dua cara baik secara langsung dan tidak langsung yang diserahkan kepada lembaga pengelola filantropi. Pasca kajian intensif dari kedua lembaga (PIRAC dan CSRC) ini menarik minat beberapa peneliti dan akademisi untuk menelisik lebih jauh melalui rangkaian penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga filantropi memiliki kontribusi sebagai problem solving bagi permasalahan sosial dan persoalan kemanusiaan (Nasrullah, 2015), (Tamim, 2011), (Widayanti, 2012), (Kholiq, 2012), (Sufi’y, 2007).

Meskipun data kualitatif menunjukkan bagaimana kontribusi filantropi dalam pembangunan, namun data kuantitatif dari berbagai kajian akademis, tidak pernah bisa mengungkapkan secara tepat dan pasti berapa jumlah lembaga filantropi yang ada di Indonesia baik yang berbasis

pada keyakinan agama maupun berbasis pada nilai-nilai sosial. Hal ini juga menambah tingkat kesulitan dalam memprediksi besaran nominal dana yang terkumpul oleh masing lembaga filantropi di Indonesia. Namun demikian, harus diakui bahwa filantropi sangat potensial dikembangkan sebagai sumber pendanaan alternatif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. dapat ditelusuri melalui kemunculan lembaga-lembaga filantropi dan laporan keuangan kelembagaan. Saking besarnya potensi filantropi, Kemunculan berbagai lembaga filantropi di Indonesia baik yang dilatarbelakangi oleh agama maupun motif selain agama, perkembangan lembaga filantropi sebagian besar dilatarbelakangi oleh motif agama. Seperti Rumah Zakat, Dompot Du'afa, Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), LazizNU, LazisMU, PKPU, Dompot Sosial Madani (BSM) Bali merupakan lembaga filantropi yang berbasis agama Islam. Lembaga filantropi lainnya yang berbasis agama adalah KARINAKAS (berbasis agama Katolik), HFHInd (Kristen) dan berbagai lembaga filantropi berbasis agama lain yang belum teridentifikasi dalam kajian ilmiah.

Harus diakui bahwa pemanfaatan filantropi dalam konteks pembangunan Indonesia masih jauh dari kata ideal seperti apa yang telah dikonsepsikan dan ditawarkan oleh Midgley beserta koleganya. Dampak dan keberlanjutan dari program kerja yang dilakukan oleh lembaga filantropi belum mampu menyelesaikan akar persoalan kemiskinan yang dihadapi masyarakat. Menurut penulis disini ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari terbatasnya peran lembaga filantropi dalam pemberdayaan masyarakat Indonesia; faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merupakan penyebab dari dalam kelembagaan filantropi, misalnya terkait dengan sistem tata kelola lembaga filantropi. Permasalahan pertama terkait dengan akutabilitas lembaga filantropi, kedua keterputusan lembaga filantropi dengan stakeholders pembangunan lainnya.

#### **a. Akutabilitas lembaga filantropi**

Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi dipengaruhi oleh faktor akutabilitas lembaga filantropi sebagai penyalur dana dari para donator. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan CSRC UIN Jakarta menunjukkan bahwa kecenderungan

perilaku filantropi masyarakat dilakukan secara langsung kepada penerima daripada melalui lembaga filantropi. (Irfan dkk, 2000) Faktor penyebabnya kurangnya kepercayaan masyarakat disebabkan kekhawatiran akan dana yang mereka masukkan ke dalam lembaga filantropi tidak utuh diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Hal ini memanglah benar, karena biaya operasional sebuah lembaga filantropi diperoleh dari donasi para donatur. Sebagian kecil disisihkan dari dana hasil donasi masyarakat. Bahkan kajian yang dilakukan adanya lembaga filantropi yang membelanjakan 60% dari hasil donasi untuk operasional kelembagaan seperti sewa gedung, belanja fasilitas kantor, gaji pegawai dan lain yang harus mereka bayar dalam setiap bulannya.

Faktor lain yang mempengaruhi lemahnya akuntabilitas lembaga filantropi yaitu terkait dengan netralitas lembaga filantropi dalam pendistribusian dana. Identitas dan golongan mewarnai eksistensi lembaga filantropi dan membelenggu kiprah lembaga sebagai lembaga yang diperuntukkan untuk semua. Hanya sedikit dari lembaga filantropi yang memperhatikan faktor warna identitas dari calon penerima manfaat. Di beberapa daerah, dijumpai pula praktek penyaluran dana filantropi untuk kepentingan memperoleh simpati masyarakat, untuk menarik kelompok ke dalam golongan tertentu, penyaluran dana hanya diperuntukkan bagi orang yang mau mengikuti atau masuk dalam golongan tertentu seperti yang ditawarkan lembaga filantropi, atau penyaluran dana terbesar disalurkan kepada golongannya saja misalnya berdasarkan agama, aliran/sekte sebagai dasar pertimbangan.

Seharusnya lembaga filantropike depan harus lebih mengfisiensi dana untuk operasional kantor dan menjaga netralitasnya dalam mendistribusikan dana yang mereka kelola, dengan tidak melihat warna identitas agama, golongan, aliran manapun. Dengan demikian lembaga filantropi sebagai lembaga pengelola dana mampu menunjukkan kredibilitas dan akuntabilitas terhadap para donator dan dana yang disalurkan juga tepat sesuai dengan golongan penerima manfaat yang seharusnya yaitukelompok yang tergolong dalam kategori benar-benar membutuhkan pertolongan, kelompok-kelompok yang termarginalisasi akibat proses ekonomi dan sosial.

## **b. Keterputusan Filantropi dengan berbagai stakeholders pembangunan yang lain**

Problematika lembaga filantropi sebagai sektor ketiga dari pembangunan adalah keterputusan koneksitas dengan berbagai stakeholders lainnya. Keterputusan koneksi lembaga filantropi dengan stakeholders lainnya terletak padadominasi struktural dalam sistem perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dari tingkat daerah sampai tingkat pusat diatur oleh regulasi pemerintah. Keterlibatan sektor non pemerintah dalam sistem perencanaan pembangunan mengindikasikan bahwa paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemerintah sebagai aktor pembangunan masih belum berubah.

Dari sisi eksternal, sistem sosial dan budaya pembangunan yang parsial dan terfragmentasi kurang mendukung terhadap pengembangan filantropi kreatif. Harus diakui bahwa sistem perencanaan pembangunan dari tingkat desa sampai pusat yang kurang melibatkan aktor-aktor lain di luar pemerintah. keterlibatan dari sektor (swasta) *private* dan lembaga filantropi kurang diakomodir oleh pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan. Sumber pendana pembangunan selama ini berasal dari APBN dan APBD. Sedangkan sumber dana pembangunan yang lainnya yang potensial seperti CSR, Filantropi, LSM lembaga kemanusiaan dan Lembaga Donor Internasional belum terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan. Kebiasaan dalam sistem perencanaan pembangunan ini membentuk sebuah kultur dan membentuk mindset dalam masyarakat bahwa pemerintah lah paling bertanggungjawab atas segala perbaikan fasilitas infra struktur dan pembangunan lainnya dari di tingkatan desa maupun di tingkat pusat.

Faktor lain yang menyebabkan keterputusan filantropi dengan stakeholders pembangunan yang lainnya adalah faktor perbedaan kepentingan. Ada banyak kepentingan tersembunyi dan terselebung yang tidak pernah dimunculkan ke permukaan. Contoh kongkrit adalah ketika terjadi bencana atau penyaluran bantuan terhadap bencana alam tidak jarang kita jumpai banyak simbol-simbol yang berkibar sebagai penanda bahwa kelompok atau golongan mereka ada kelompok yang peduli sehingga patut diapresiasi oleh khalayak umum. Beragam kepentingan memotivasi dibalik perilaku filantropi mulai dari kepentingan ekonomi, sosial maupun kepentingan politik. Praktik filantropi mengalami

pergeseran makna sebagai wujud dari kasih sayang terhadap sesama yang diaplikasikan dalam berbagai bentuk dan wujud tanpa melihat latar belakang ideologi, agama dan politik penerima. Disamping perbedaan kepentingan, perbedaan ideologi dan visi misi dari lembaga filantropi menjadi penghambat relasi lembaga filantropi dengan sesama lembaga filantropi ataupun lembaga-lembaga lainnya terkait dengan isu-isu fokus kerja masing-masing lembaga.

Kompetisi antar sesama lembaga filantropi untuk menarik minat para pelanggan yang akan mempercayakan pengelolaan dana donasi atau karitas, disatu sisi bisa membawa dampak positif bagi lembaga filantropi yaitu bertambahnya dana yang dikelola, namun disisi yang lain berdampak negatif terhadap pertumbuhan filantropi kreatif dan tranformatif. Disinilah menurut hemat penulis, pentingnya merumuskan kembali dan memikirkan posisi dan peran filantropi dalam pembangunan dengan mengesampingkan kepentingan ideologis, kepentingan agama maupun politik. Mewujudkan kenyataan bahwa lembaga filantropi sebagai pilar ketiga pembangunan, mewujudkan harapan untuk kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian tantangan terberat lembaga filantropi ke depan adalah mewujudkan filantropi kreatif transformatif yang mampu mensinergikan seluruh pilar-pilar pembangunan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Perlu adanya terobosan kebijakan dari pemerintah berupa regulasi yang mengatur pembagian kerja masing-masing stakeholders.

### **C. Simpulan**

Dana filantropi baik yang dikelola secara kelembagaan (terorganisir) maupun secara secara tradisional oleh warga masyarakat pada umumnya mempunyai potensi besar. Namun demikian, pemanfaatan dana filantropi yang besar belum mampu menjawab permasalahan utama dari masalah sosial yang dihadapi bangsa ini seperti masalah kemiskinan. Kendala utama (filantropi terorganisir) dalam pemanfaatan dana filantropi bersumber dari faktor internal kelembagaan filantropi menyangkut tata kelola pengorganisasian dan akuntabilitas organisasi. Kendala komunikasi dan kerjasama antara stakeholders pembangunan lainnya menjadi tanda bahwa lembaga filantropi yang ada saat ini sangat rentan dan rapuh.

Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan filantropi sebagai sektor ketiga (alternative) dalam pembangunan dengan memberikan ruang terhadap lembaga filantropi untuk membangun kelembagaan yang kuat untuk menambah daya dobraknya dalam pembangunan. Membangun kerjasama, saling berkorrespondensi, saling berkomunikasi dan membuka ruang dialogis antara berbagai stakeholders pembangunan.

Menurut hemat penulis, disamping upaya tersebut diatas, pemerintah juga harusnya melibatkan peran aktif dari sektor ketiga (selain lembaga filantropi) dalam proses perencanaan pembangunan dari level desa sampai ke pusat. Pemetaan keterlibatan berbagai stakeholders dalam pembangunan diperlukan untuk memperjelas pembagian kerja stakeholders serta meminimalisir terjadinya tumpang tindih program kerja masing-masing stakeholders.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Irfan dan Chaider SB (editor). 2006. *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial; Studi Tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam Di Indonesia.*Jakarta: CSRC UIN Jakarta.
- Anheier, H. K., & Leat, D. 2006. *Creative Philanthropy;Toward a New Philanthropy for the Twenty-First Century.* London and New York: Routledge.
- Burlingame, Dwight F. 2006. *Philanthropy dalam Microsoft Encarta Standard*
- Ilchman, W. F. ., Katz, S. N. ., & Queen, E. L. (Eds.). (1998). *Philanthropy In The World's Traditions.* Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
- Idris Thaha (editor). 2003. *Berderma untuk Semua.*Jakarta: Teraju Mizan dan PBB UIN Jakarta.
- Kholiq, A. 2012. *Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di kota semarang.* Riptek.
- Midgley, James O.1995. *Social Development; the Developmental Perspective In Social Welfare.* London: Sage Publication
- Midgley,James O.1997. *Social Welfare in Global Context.* London :Sage Publication
- Nasrullah, A. 2015. *Pengelolaan DANA Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa.* Hunafa: Jurnal Studia Islamika.
- Neilsen, Wa. A. 1996. *Inside American Philanthropy:The Dramas of Donorship.* Norman and London: University of Oklahoma Press.
- Payton, R. L., & Moody, M. P. 2008. *Understanding Philanthropy;Its Meaning and Mission.* Bloomington: Indiana University Press.
- Pirac. 2002. *Investing in Our Selves;Giving and Fund Raising In Indonesia.* Phillipine : Asian Development Bank.

- Prihatna, Andi Agung. 2005. *Filantropi Dan Keadilan Sosial di Indonesia*. dalam Bamualim, Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar. *Revitalisasi Filantropi Islam; Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: PBB UIN Jakarta dan Ford Foundation.
- Saidi, Zaim, dkk. 2003. *Pola dan Strategi Penggalangan Dana Sosial di Indonesia*. Jakarta: PIRAC.
- Saidi, Zaim, dkk. 2006. *Kedermawanan Untuk Keadilan Sosial*. Jakarta: Piramedia
- Peter, F. 2006. *Strategic giving: the art and science of philanthropy*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Schearer, S. B. 1995. *THE ROLE OF PHILANTHROPY IN INTERNATIONAL* Paper Prepared for the October 16-19, 1995. Retrieved from <http://www.synergos.org/knowledge/95/philanthropyininternationaldevelopment.pdf>
- Sufi'y, M. (2007). Menegaskan Ulang Visi Filantropi Islam. *SHABRAN, Jurnal Studi Dan Dakwah Islam*, 20(1), 42–48. Retrieved from <http://publikasiilmiah.ums.ac.id:80/handle/123456789/1062>
- Saidi, Zaim, dkk. 2003. *Pola dan Strategi Penggalangan Dana Sosial di Indonesia*. Jakarta: PIRAC
- Saidi, Zaim, dkk. 2006. *Kedermawanan Untuk Keadilan Sosial*. Jakarta: Piramedia
- Tamim, I. H. (2011). Peran Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di dalam Komunitas Lokal. *Jurnal Sosiologi Islam*, 1(1), 35–58. Retrieved from <http://jsi.uinsby.ac.id/index.php/jsi/article/view/4>
- Widayanti, S. 2012. *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : Pendekatan Teoritis*. *WELFARE; Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 87–102.

